

**INTEGRASI SOSIAL DI PERDESAAN:
KETERKAITAN KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN DESA-DESA SEKITAR**

***SOCIAL INTEGRATION IN RURAL:
LINKAGE OF TRANSMIGRATION AREA WITH VILLAGES NEIGHBOURHOOD***

Widarjanto dan Slamet Rahmat Topo Susilo

Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jl. TMP Kalibata 17 Jakarta Selatan, Telp/Fax 021 7971010

E-mail: anto3369@yahoo.co.id

Diterima: 31 Mei 2016; Direvisi: 12 Desember 2016; Disetujui: 14 Desember 2016

Abstrak

Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi maupun sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan pelaksanaan. Kelembagaan dapat menghimpun norma dan aturan yang dibuat dan disepakati dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan bersama berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi integrasi sosial, mempelajari pelaksanaan pengembangan masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat transmigrasi dan merumuskan saran tindak dan pendekatan pengembangan masyarakat yang lebih sesuai dalam pembangunan transmigrasi. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif. Melalui kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika proses seperti interaksi yang intensif, terjadi harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi. Dinamika proses yang terjadi menghasilkan integrasi sosial dengan dukungan tiga kekuatan integratif, yaitu koersif di pusat Kota Terpadu Mandiri (KTM), normatif di desa-desa hinterland, dan kawasan KTM dengan integrasi fungsional. Semua unsur melakukan harmonisasi pada derajat tertentu dalam menjamin kelangsungan sistem sosial.

Kata kunci: pengembangan masyarakat, integrasi sosial, transmigrasi.

Abstract

Community development through community and regional based institutions has seen as an effective approach. Those approach, both economic and social institutions can facilitate in the controlling of decision-making, policy, program, and implementation. The research objective is to analyze the conditions of social integration, between migrant and origin community. The research is a qualitative and uses case studies that looks at social reality as something holistic, complex, dynamic, and full of meaning, as well as seeing the interactive relationship of symptoms. Institutions can lead to such intensive interaction processes, harmonization, tolerance, collective activity, and participation. The dynamics of the processes that occur will generate social integration with the support of three integrative forces, namely coercive forces in the center of the Integrated Independent City (KTM), normative forces in the hinterland villages, and the KTM regions with functional integration. All elements harmonize at certain degrees in ensuring the continuity of the social system.

Keywords: community development, social integration, transmigration.

PENDAHULUAN

Pembangunan transmigrasi merupakan suatu sistem pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan secara terpadu, yang melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan termasuk mengintegrasikan transmigran dan penduduk setempat. Pelaksanaannya mengintegrasikan berbagai program terkait baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Dengan gambaran demikian, pembangunan transmigrasi memiliki ciri pembangunan sosial yang diperkenalkan oleh James Midgley, terutama dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Midgley (1995), menawarkan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan untuk mendukung kesejahteraan penduduk, yang berjalan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, seperti dua sisi mata uang. Pembangunan sosial didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis.

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak kawasan transmigrasi yang telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan (Soegiharto, 2008). Namun disadari tanpa mengesampingkan hasil yang telah dicapai, keberhasilan pembangunan transmigrasi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, diantaranya karena lahan yang kurang layak, rendahnya produktivitas usahatani, kurang lancarnya proses distribusi, keterbatasan prasarana sarana, rendahnya kompetensi transmigran, dan tidak terbentuk keterkaitan pusat-pusat pertumbuhan baru. Berdasarkan pengalaman empirik, suatu lokasi transmigrasi Pola Tanaman Pangan (Jenis TU)

yang berkembang menjadi sentra produksi atau menjadi ibukota kecamatan/kabupaten membutuhkan waktu selama 17–20 tahun (Gavin Jones, 1982; Arndt dan Sundrum, 1982 dalam Haryati dkk, 2006; Soegiharto, 2008). Kondisi ini disebabkan permukiman transmigrasi yang ada kurang mendorong terbentuknya hubungan ekonomi antara transmigran atau permukiman transmigrasi dengan masyarakat sekitar atau daerah di luar permukiman transmigrasi. Pembangunan permukiman transmigrasi diyakini tidak semata-mata membangun fisik, tetapi akan membangun suatu komunitas masyarakat yang mandiri berdasarkan atas prinsip kesejahteraan ekonomi dan sosial baik secara kelompok maupun individu.

Selama ini program transmigrasi menimbulkan dinamika sosial baru dan dampak sosiologis bagi transmigran pendatang, transmigran daerah asal dan penduduk sekitar permukiman transmigrasi. Hal ini disebabkan oleh faktor hubungan dan pola kehidupan bermasyarakat di daerah yang baru sangat berbeda dengan daerah asalnya. Di permukiman baru, transmigran harus berintegrasi dengan masyarakat atau penduduk asli setempat yang sifat dan karakteristiknya sangat berbeda dengan tempat asalnya (Soekiman dan Yulianto, 1997).

Program transmigrasi ini mengakibatkan adanya perpindahan sistem kebiasaan, sistem kewenangan dan kerjasama, sistem pengawasan tingkah laku dan kebebasan, kebebasan individu yang berbeda satu sama lainnya. Dengan kenyataan tersebut, tidak mengherankan jika terjadi konflik antar pendatang dan penduduk setempat di permukiman transmigrasi yang baru.

Berdasar paradigma pembangunan transmigrasi baru, untuk mempercepat pengembangan masyarakat transmigrasi sebagai proses integrasi sosial dapat

diwujudkan dengan membentuk pusat pertumbuhan dalam waktu 10-15 tahun. Akselerasi pembangunan dan pengembangan masyarakat itu dilakukan melalui pendekatan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Inti dari penyenggaraan KTM adalah pembangunan sistem pengembangan masyarakat transmigrasi dalam kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif dalam skala ekonomi dan sosial sesuai dengan rencana daerah dalam mengembangkan wilayahnya. Dalam kawasan ini, selain permukiman transmigrasi baik permukiman baru maupun yang telah menjadi desa, juga termasuk penduduk setempat yang bermukim di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang berada dalam kawasan tersebut. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 214/MEN/V/2007).

Karakteristik KTM merupakan kebijakan pembangunan sosial yang bertujuan untuk percepatan pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus mewujudkan integrasi sosial menuju kesejahteraan sosial. Pembangunan KTM bersifat lintas sektor, integrasi pembangunan sosial dan ekonomi serta melibatkan peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Permasalahan mendasar dari model percepatan pengembangan masyarakat dalam skema KTM adalah pembangunan prasarana dan sarana fisik tidaklah serta merta dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan integrasi sosial sebagaimana yang diharapkan. Perwujudan pengembangan masyarakat seperti tercapainya perilaku masyarakat yang produktif, efisien, berwawasan luas, peduli lingkungan dan berfikiran modern menuju masyarakat madani belum terbentuk. Upaya untuk mendukung pewujudan wilayah pusat pertumbuhan selain diperlukan berbagai agenda untuk melakukan perubahan yang bersifat fisik spasial, seperti penetapan tata ruang,

pembangunan permukiman, serta penyediaan sarana industri dan jasa, juga diperlukan perubahan sikap dan cara pikir masyarakat transmigrasi dari tradisional menuju modern (Najiyati dkk, 2008).

Beberapa hasil penelitian menyimpulkan adanya faktor-faktor pendukung, pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial, upaya-upaya untuk meningkatkan integrasi sosial dan bentuk integrasi sosial. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pembangunan fisik dan ekonomi masih menjadi faktor utama dalam mempengaruhi integrasi sosial, sehingga belum terlihat keterpaduan antara program pengembangan ekonomi dan program pengembangan masyarakat transmigrasi dalam mewujudkan pembangunan transmigrasi. Permasalahan tersebut adalah pembangunan yang terlihat bias fisik prasarana sarana dan belum menyentuh pengembangan masyarakat, dominasi pembangunan *top down* dan peran pemerintah masih mendominasi, partisipasi masyarakat dan non pemerintah dalam pembangunan KTM belum terlihat, terjadinya permasalahan sosial seperti gesekan antara transmigran dan penduduk setempat, pendapatan transmigran masih rendah, serta kemandirian individu dan kelompok transmigran belum terbentuk.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena permasalahan yang muncul, terjadi kemampuan membangun yang berbeda antara transmigran dan penduduk sekitar di kawasan transmigrasi. Apabila hal ini berlanjut akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan membahayakan keberlanjutan pengembangan masyarakat karena akan memicu konflik sosial (disintegrasi).

Penelitian ini berupaya melakukan analisa berdasarkan kondisi, bentuk, potensi dan kendala terwujudnya integrasi sosial. Bertitik

tolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah menganalisis kondisi integrasi sosial di kawasan transmigrasi (perdesaan).

METODE

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan melihat hubungan gejala yang bersifat interaktif (Creswell, 2009).

Tahapan penelitian dimulai dengan mendeskripsikan masalah-masalah integrasi di kawasan transmigrasi meliputi faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial; menggambarkan kondisi riil pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi; prospek kecenderungan dan analisis masalah pengembangan masyarakat transmigrasi; dan penyusunan rekomendasi pengembangan masyarakat transmigrasi untuk menentukan intervensi yang tepat.

Lokasi penelitian di kawasan KTM Rambutan Parit, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan terdapat permukiman transmigrasi pola tanaman pangan yang mendapat program akselerasi pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan asumsi transmigran telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar termasuk penduduk sekitarnya. Tipologi kawasan untuk analisis terbagi menjadi tiga, yaitu di pusat KTM, di desa-desa sekitar dan kawasan KTM.

Penentuan informan dengan purposive sampling untuk mendapatkan kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan sampel yang dibutuhkan. Dasar kriteria informan adalah yang paling tahu tentang apa yang diharapkan, dan memudahkan dalam menjelajahi situasi sosial yang diteliti, seperti transmigran dan penduduk sekitar, tokoh formal dan informal

masyarakat transmigrasi, *stakeholder* seperti pedagang, pemilik usaha perdagangan, jasa atau industri, dan penampung hasil pertanian, aparat instansi terkait, dan aparat pemerintah daerah seperti kepala kantor KTM, kepala kantor kimtrans, pendamping, dan kepala desa.

Menurut Rubin dan Babbie (2008), pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data yang dikumpulkan berada pada setting alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan yang tidak dapat dipahami apabila dipisahkan dari konteksnya, yaitu kawasan transmigrasi. Dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya dari teknik pengumpulan data, dilakukan dengan observasi partisipatif, wawancara/ interview mendalam, diskusi kelompok terfokus, dokumentasi dan gabungan (triangulasi). Penelitian ini menggunakan teknik analisa data berdasarkan pada tahapan penelitian, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema waktu (Spradley, 1980). Pisau analisis untuk membedah kondisi integrasi sosial adalah dimensi integrasi sosial menurut konsep Wirutomo (2012), yang terbagi menjadi integrasi normatif, fungsional, dan koersif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kawasan KTM

KTM dibangun untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta untuk menumbuhkan-kembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar, membuka peluang

usaha dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar, serta meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Kawasan Rambutan Parit ditetapkan sebagai KTM pada tahun 2007 dengan pusatnya berada di permukiman transmigrasi Rambutan 1.

Fasilitas umum dan sarana usaha dibangun agar transmigran betah tinggal di permukiman transmigrasi untuk berusaha. Sarana usaha tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat sekitar kawasan transmigrasi. Fasilitas umum dan sarana usaha yang sudah dibangun yaitu pasar, sarana pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Pasar belum dimanfaatkan oleh transmigran dan lebih banyak digunakan oleh pedagang dari luar permukiman transmigrasi. Sedangkan sarana usaha seperti lembaga permodalan, Koperasi, UPJA, kelompok tani dan Gapoktan sudah berkembang dan berfungsi baik. Di kawasan ini terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan transmigran dan penduduk sekitar menjadi pekerja di waktu pekerjaan di lahan tidak banyak. Bekerja di kelapa sawit menjadi wahana untuk berinteraksi antara transmigran dan penduduk setempat.

Integrasi Sosial di Kawasan KTM

Integrasi sosial dapat terbentuk apabila para anggota masyarakat bersepakat mengenai struktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dimensi integrasi sosial menurut konsep Wirutomo (2012), terbagi menjadi integrasi normatif, fungsional, dan koersif.

a. Pusat KTM

Proses integrasi di pusat KTM terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, proses kerjasama, saling tolong menolong

dan toleransi sosial cukup baik, terutama transmigran yang berasal dari Jawa. Diakui bahwa transmigran Jawa memiliki tingkat adaptasi sosial yang cukup tinggi sehingga jarang menimbulkan gesekan budaya maupun sosial yang mengganggu hubungan antar etnik. Interaksi yang intens terjadi karena seringnya bertemu, bermusyawarah, dan bergotong-royong dalam wahana yang diciptakan oleh pemerintah. Keikutsertaan dalam program transmigrasi “memaksa” transmigran pendatang dan penduduk setempat yang menjadi transmigran berada dalam tempat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai transmigran. Hak sebagai transmigran adalah menerima bantuan-bantuan, seperti menerima jaminan hidup, paket produksi standar, sarana produksi non standar, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan intensifikasi lahan pekarangan atau usaha, program kewirausahaan, Gapoktan, Koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Sedangkan kewajiban yang harus dipatuhi adalah harus tinggal menetap di permukiman transmigrasi dengan mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara dan mengembangkan kegiatan usaha, mempertahankan pemilikan tanah dan aset produksi, memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadatnya.

Berdasar hasil penelitian, berkumpul dan menetapnya beberapa etnis mendorong terjadinya bentuk integrasi koersif dalam lingkup pusat KTM, dan dikondisikan oleh beberapa faktor yaitu nilai dasar, toleransi, struktur, partisipasi, dan agama.

b. Desa-Desa Sekitar

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM termasuk juga pengembangan

desa-desa sekitar. Desa-desa yang termasuk dalam delineasi KTM Rambutan Parit dapat dikelompokkan ke dalam dua kluster berdasar jarak terhadap pusat KTM. Kluster pertama dengan jarak yang dekat adalah Desa Sungai Rambutan, dan Desa Tanjung Pule. Kluster kedua dengan jarak cukup jauh adalah Desa Bakung, Desa Parit, Desa Lorok, dan Desa Purnajaya. Konektivitas antara pusat KTM dengan desa-desa sekitar telah terhubung dengan dibangunnya jalan.

Integrasi di lingkup desa sekitar terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, identifikasi, proses kerjasama, saling tolong-menolong dan toleransi sosial cukup baik. Kondisi ini tercermin dari proses terbentuknya integrasi yang terjadi di desa-desa sekitar. Pada kelompok etnik yang homogen, biasanya ciri ras, fisik, agama, sikap, hubungan kekeluargaan, pekerjaan dan kekerabatan dapat menjadi dasar dari ikatan/bonding masyarakat. Karakteristik kultural penduduk desa sekitar permukiman transmigrasi ditandai dengan keberagaman strata sosial dan ekonomi, tetapi relatif homogen dalam hal etnis budaya, dan agama. Homogenitas dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kegiatan gotong royong dan kerja bakti di lingkungan desa, membersihkan parit, perbaikan rumah ibadah, perbaikan jalan desa, medatangi undangan hajatan, menjenguk yang sakit, dan melayat yang meninggal,

Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan melalui musyawarah, terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas

kepentingan pribadi dan golongan. Suasana pedesaan yang masih kental menjadikan masyarakat di desa-desa ini seakan seluruhnya saling mengenal satu sama lain. Hubungan kekerabatan yang saling kait-mengkait satu sama lain menggambarkan masyarakatnya sebagai sebuah keluarga besar. Wujud dari kekeluargaan tampak pada sikap toleran dan solidaritas sesama mereka dengan saling menyapa, mengunjungi, membantu atau tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai integrasi normatif, dimana ikatan sosial terjadi karena suatu kesepakatan terhadap nilai-nilai dan norma dasar sebagai wujud mempertahankan dan mewujudkan struktur sosial sebagai masyarakat yang homogen.

Kehadiran program pembangunan transmigrasi disekitarnya membuat mereka harus berinteraksi dengan masyarakat yang relatif beragam dalam hal entis, budaya, kebiasaan, dan agama. Motto hubungan dengan pendatang adalah kebersamaan, saling menerima, dan mencontoh pendatang karena ulet, misalnya dalam hal budidaya palawija dan kelapa sawit. Selain itu, ada rasa kekeluargaan kepada siapa saja terutama kepada tetangga dan kenalan tanpa pilih kasih apakah seseorang itu sebagai pendatang yang ada hubungan keluarga atau tidak. Dari kondisi integrasi sosial di desa-desa sekitar, teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kesamaan etnis/suku, agama, kebudayaan, pekerjaan, dan pendapatan.

c. Kawasan KTM.

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM Rambutan Parit adalah untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru sekaligus

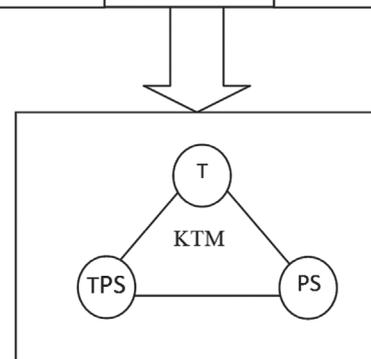
untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Dengan terbentuknya kawasan ini, diharapkan meningkatkan kemudahan-kemudahan bagi transmigran dan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila proses ini berjalan lancar, dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan terwujudnya integrasi transmigran dengan penduduk sekitar.

Pembangunan dan pengembangan kawasan KTM dirancang melalui pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi meliputi pembangunan pusat KTM dan beberapa desa di hinterland dalam satu kawasan. Pembangunan pusat KTM dimaksudkan untuk menyatukan visi kawasan transmigrasi yang dikembangkan memenuhi fungsi-fungsi perkotaan. Perwujudan fungsi perkotaan adalah tersedianya berbagai fasilitas meliputi pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri pengolahan hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan dan pelatihan, sarana pemerintahan, fasilitas umum, dan sosial.

Proses dan dinamika integrasi fungsional tengah berlangsung di kawasan ini melalui komunitas di desa-desa sekitar dengan memanfaatkan prasarana dan sarana yang telah dibangun. Modal fisik berupa jalan penghubung telah memberi dampak positif dalam membuka komunitas yang mengelompok dan terpencil, kemudian mengintensifkan interaksi sosial antara anggota komunitas yang berbeda. Selanjutnya mampu memperluas kohesi sosial dari sempit dengan anggota komunitas sendiri menjadi semakin luas dalam masyarakat kawasan KTM. Ini merupakan suatu ikatan sosial yang didasarkan situasi saling ketergantungan fungsional antara unsur satu dan lainnya.

Dengan pemanfaatan berbagai fasilitas menyerupai fungsi kota, terjadi interaksi yang rutin dan terus-menerus mengakibatkan kesepahaman ke arah proses integrasi sosial. Terjadi percepatan proses transformasi sosial masyarakat rural ke arah masyarakat urban, tanpa harus meninggalkan pola usaha utama sebagai petani serta peningkatan pendapatan individu, keluarga, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini diperlihatkan dengan tersedianya berbagai pelayanan-pelayanan yang mencerminkan kondisi perkotaan. Namun kondisi perkotaan masih memiliki nuansa pertanian yang diperlihatkan dengan adanya perusahaan komoditas pertanian sebagai unggulan dan aktivitas agribisnis. Kondisi proses integrasi fungsional di kawasan transmigrasi terjadi karena adanya fungsi dan manfaat, pelaksanaan program pengembangan masyarakat, sarana dan prasarana, pendapatan, bekerja di perusahaan perkebunan, dan agama.

Kawasan Transmigrasi (Kota Terpadu Mandiri)		
Pusat KTM (Permukiman Transmigrasi)	Desa Sekitar/ Hinterland	Kawasan KTM (Pusat dan Desa-Desa Hinterland)
Integrasi Koersif	Integrasi Normatif	Integrasi Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai dasar 2. Toleransi 3. Struktur 4. Partisipasi 5. Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etnis/Suku 2. Pekerjaan 3. Pendapatan 4. Agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi dan manfaat 2. Pendapatan 3. Sarana dan prasarana 4. Pelaksanaan program pengembangan masyarakat 5. Bekerja di perkebunan



Keterangan:

T: transmigran

TPS: transmigran penduduk setempat

PS: penduduk setempat

Gambar 1. Deskripsi Kondisi Integrasi Sosial di KTM
Rambutan Parit

Ke tiga integrasi yang terjadi itu bukan merupakan tahapan, melainkan seperti tiga pilar yang menyangga kawasan transmigrasi. Semua kekuatan integrasi itu penting dan selalu ada pada derajat tertentu, ideal dalam jumlah yang proposional dan seimbang sehingga menjamin kelangsungan sistem sosial. Ketiga unsur integrasi tersebut pada dasarnya tidak saling meniadakan tetapi justru saling berinteraksi untuk menemukan keseimbangan yang dinamis (Wirutomo, 2012).

Analisis Pengembangan Masyarakat Mendukung Integrasi Sosial

Proses pengembangan masyarakat lebih efektif apabila dilaksanakan dalam bentuk kelembagaan atau organisasi. Bahwa pendekatan pengembangan masyarakat lebih berdaya jika diorganisasikan melalui kegiatan kolektif yang dapat mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, proyek program, dan pelaksanaannya. Organisasi kolektif menghimpun norma-norma segala tingkatan yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan tertentu berkisar pada suatu kebutuhan-kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat (Nasdian, 2014).

Dengan rujukan norma-norma yang diputuskan bersama, dan dianut terjadi proses interaksi pada sistem sosial di masyarakat dan mendorong terjadinya saling percaya dalam interaksi semakin tumbuh yang pada akhirnya mewujudkan integrasi sosial. Pengembangan masyarakat dijalankan dengan mengorganisir

diri dalam suatu kelembagaan ekonomi dan sosial cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas. Masyarakat dalam hal ini adalah anggota masyarakat yang diorganisasikan menjadi suatu kelompok yang bersifat komunitas yang saling mengenal, terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama, didudukkan sebagai pelaku dan penentu program. Upaya ini dirasakan cukup strategis mengingat kelembagaan masyarakat merupakan kolaborasi dari interaksi sosial pada suatu komunitas untuk kepentingan bersama.

Kelembagaan dibuat dengan tujuan yang sama merupakan suatu perekat yang dapat menyatukan antar anggota masyarakat transmigrasi melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan sehingga mampu memobilisasi semua potensi baik yang berasal dari dalam maupun luar tanpa ada satupun yang merasa dirugikan (Zubaedi, 2013). Pengembangan masyarakat merupakan program yang membutuhkan waktu, energi, komitmen, dalam wilayah tertentu, dan hasilnya belum tentu memuaskan. Pemerintah terlibat dalam upaya pengembangan masyarakat sebagai pemulai (starter).

Kelembagaan masyarakat yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan kebutuhan sosial lainnya seperti lembaga pelayanan pendidikan, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga keamanan desa, lembaga keagamaan, dan lembaga kepemudaan. Kelembagaan yang dibangun hampir sama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk di desa. Lembaga ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Fungsinya adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya

demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan komunitas, posisi dan fungsi kelembagaan merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Selanjutnya, pengembangan masyarakat mendorong terjadinya interaksi antar orang-orang dalam dan antar komunitas dengan frekwensi sesuai dengan program dan jadwal pelaksanaan pengembangan masyarakat yang diberikan. Peran anggota masyarakat transmigrasi dalam suatu kelembagaan dapat berupa menjadi pengurus kelembagaan atau hanya menjadi anggota saja. Dengan aktivitas kelembagaan yang efektif, memunculkan kesadaran anggota masyarakat transmigrasi dalam menghidupkan roda kelembagaan untuk memanfaatkan, berkumpul, dan menggunakan mekanisme musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Individu dalam kelembagaan belajar untuk mendiskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka. Anggota kelembagaan belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, dan merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Menurut Polak (1966), kelembagaan itu memiliki tujuan untuk mengatur antarmubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting (Nasdian, 2014).

Prinsip-prinsip proses, dapat menciptakan kerjasama yang lebih luas dalam aktivitas masyarakat dan mendorong terjadinya integrasi sosial. Dilihat dari proses perubahan, maka yang direncanakan adalah suatu tindakan untuk membangun aspek manusia termasuk proses interaksi dengan sistem sosial di masyarakat (Soetomo, 2009). Integrasi sosial dalam lingkup permukiman transmigrasi mengarah ke koersif, sedangkan antar komunitas yaitu antara

komunitas di permukiman transmigrasi dan komunitas pada desa-desa sekitar mengarah ke fungsional. Untuk komunitas di dalam desa terjadi integrasi normatif.

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berupaya mempersatukan komunitas dan menjamin agar setiap kegiatan komunitas diarahkan untuk membangun komunitas itu dengan mencari upaya agar semakin banyak anggota komunitas yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Hal ini akan memberi peluang bagi semua untuk berinteraksi baik secara formal maupun informal. Suasana informal sering lebih disukai. Dengan demikian, pembangunan kelembagaan tidak sesederhana mengumpulkan orang-orang, tetapi mencakup upaya-upaya mendorong dan menyediakan kondisi yang sesuai untuk bekerjasama, menyediakan struktur, mekanisme saling membutuhkan dalam melakukan kegiatan bersama, dimana setiap orang dapat memberi sumbangan dan menghargai sumbangan orang lain.

Pelembagaan di kawasan KTM membutuhkan proses yang cukup lama hingga aturan, tata cara menyalurkan dan memperoleh layanan dari kelembagaan itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama. Faktor-faktor keberhasilan proses kelembagaan adalah:

1. Terdapat tujuan kebutuhan dan masalah bersama antara transmigran dan penduduk sekitar, sehingga terjadi pola dan aturan kerjasama baru. Tanpa adanya tujuan dan masalah tidak mungkin ada alasan yang cukup untuk mengembangkan dan memperkenalkan norma dan perilaku baru di dalam warga. Disinilah pentingnya dari upaya peningkatan kesadaran sebagai bagian penting dari upaya pengorganisasian dan pengembangan kelembagaan.
2. Terdapat dasar-dasar persamaan pola kebudayaan asal dan agama diantara

masyarakat transmigrasi menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka secara keseluruhan terhadap norma dan perilaku tertentu yang diperkenalkan. Latar belakang budaya seseorang menentukan cara pandang terhadap suatu perilaku dan norma tertentu.

3. Tersediannya tokoh-tokoh pemimpin sangat menentukan keberhasilan proses pelebagaan. Hal ini mudah dipahami karena pemimpin umumnya menjadi sumber inspirasi dan inovasi atas norma dan perilaku baru yang diperlukan. Para pemimpin juga menjadi acuan seluruh anggota komunitas tentang penataan terhadap norma dan perilaku sehari-hari.
4. Terjadinya frekuensi interaksi yang cukup diantara pihak-pihak di dalam suatu masyarakat transmigrasi sebagai sarana untuk mendiskusikan, menilai atau mengevaluasi kemapanan, keteraturan, stabilitas, dan kecocokan setiap norma dan perilaku baru yang diperkenalkan.
5. Terjadinya interaksi dan kerjasama yang baik, diantara unsur-unsur di dalam warga sebagai sarana untuk menerapkan norma-norma dan perilaku yang diperkenalkan.
6. Komunkasi sosial dengan posisi setara (antara transmigran, transmigran penduduk setempat, dan penduduk setempat) menjadi faktor penting dalam mewujudkan integrasi sosial, sehingga tidak ada orang yang merasa diperdaya melalui proses komunikasi ini.

KESIMPULAN

Integrasi sosial di kawasan KTM terjadi karena dukungan tiga kekuatan integratif, yaitu koersif, normatif, dan fungsional. Semua unsur melakukan harmonisasi pada derajat tertentu dalam menjamin kelangsungan sistem sosial. Integrasi sosial terbentuk melalui serangkaian proses yang terjadi dalam batasan kawasan transmigrasi, terdiri dari pusat KTM, desa-desa hinterland dan kawasan KTM. Kondisi

integrasi koersif di pusat KTM terjadi dengan adanya interaksi sehari-hari, proses kerjasama, saling tolong menolong dan toleransi sosial cukup baik. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial di pusat KTM adalah persamaan nilai-nilai dasar, adanya toleransi, dukungan struktural, adanya partisipasi, dan persamaan agama. Kondisi integrasi normatif di lingkup desa sekitar terlihat dengan adanya interaksi sehari-hari, identifikasi, proses kerjasama, saling tolong-menolong dan toleransi sosial cukup baik. Faktor pendukung terjadinya integrasi sosial di desa-desa hinterland adalah kesamaan etnis (adat dan budaya), agama, pekerjaan, dan pendapatan. Integrasi di kawasan KTM termanifes dengan pemanfaatan berbagai fasilitas menyerupai fungsi kota, terjadi interaksi yang rutin dan terus-menerus mengakibatkan kesepahaman ke arah proses integrasi fungsional. Faktor pendorong terjadinya integrasi sosial di kawasan adalah adanya fungsi dan manfaat, pelaksanaan program pengembangan masyarakat, sarana dan prasarana, persamaan pendapatan, dan persamaan agama.

SARAN

Pengembangan masyarakat lebih efektif dilaksanakan melalui kelembagaan berbasis komunitas dan kawasan. Melalui pendekatan kelembagaan, baik kelembagaan ekonomi dan sosial dapat mempermudah mengontrol pengambilan keputusan, kebijakan, proyek/program, dan pelaksanaannya. Kelembagaan dapat menghimpun norma dan aturan yang dibuat dan disepakati dalam mengatur pergaulan hidup dengan tujuan bersama berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kelembagaan dapat mendorong terjadinya dinamika sistem atau proses seperti interaksi yang intensif, harmonisasi, toleransi, kegiatan kolektif, dan partisipasi masyarakat transmigrasi berbasis kawasan.

Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi yang berkelanjutan memerlukan pengembangan yang seimbang, terpadu dan pendekatan sinergi lintas sektor. Pengembangan yang seimbang mencakup sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan spiritual serta dilakukan terpadu mengingat adanya berbagai program di berbagai instansi. Model pengembangan masyarakat yang diusulkan adalah sinergitas perencanaan dalam satu kawasan transmigrasi, dilakukan dengan mengakomodir dalam master plan kawasan transmigrasi melibatkan lintas sektor terkait. Pengembangan masyarakat di masing-masing satuan permukiman dilandasi dengan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Tahapan pengembangan masyarakat dilakukan melalui tahap indentifikasi kebutuhan/persiapan (*engagement*); tahap pengkajian (*assessment*); tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*); tahap pelaksanaan kegiatan (*implementation*); tahap evaluasi (*evaluation*); dan tahap terminasi (*termination*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih disampaikan kepada Bapak Asnawi, Bapak Ahmad Zaili, dan Bapak Ahmad Zuber di Palembang dan Indralaya yang telah membantu dalam mengumpulkan data dan informasi di KTM Rambutan Parit.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, I. (2002). Metode Evaluasi Program Pemberdayaan. Artikel ini merupakan perbaikan makalah yang disampaikan pada Kongres dan Seminar Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia tahun 2002 di Bogor, Jawa Barat, 28-29 Agustus 2002

Alfitri (2010). Program *Community development*

Perusahaan Migas dalam Penguatan Modal Sosial. Disertasi. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publication.

Haryati, dkk. (2006). *Studi Pembangunan Pusat Pertumbuhan*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ife, J. & Tesoriero, F. (2008). *Community development: Community Based Alternatives in on Age Globalisation*. Perason Education Australia, Unit 4, Level 3, 14 Aquatic Drive Frenchs Forest NSW 2086.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 214/Men/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi.

Lawang, R. M. Z. (2004). *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai, Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Depok: FISIP UI Press.

Midgley, J. (1995). *Sosial Development: the Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publications Ltd.

Najiyati, S. dkk. (2008). *Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Desa Sekitar*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana.

Nasdian, F.T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rubin, A & Babbie, E.R. (2008). *Research*

- Methods for Social Work, 6th Edition.
Thomson Brooks/Cole.
- Soegiharto, S. (2008). *Transmigrasi: Belajar dari Kisah Sukses*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekiman & Yulianto. (1997). *Dimensi Sosial, Ekonomi dan Budaya dalam Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal di Provinsi Lampung*. Dalam Muhajir Utomo dan Rofiq Ahmad, *90 Tahun Kolonisasi 45 Tahun Transmigrasi*. Jakarta: Puspa Swara.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat. Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Spradley, J.P. (1980). *The Participation Observation*. New York: Reinhart & Winston.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Wirutomo, P dkk. (2012). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Parktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.